



**PEMBERDAYAAN GURU:
suatu usaha peningkatan mutu pendidikan**

Orasi Ilmiah
Disampaikan Dalam Upacara
Dies Natalis XIV Universitas Terbuka
Jakarta, 14 September 1998

Oleh:
Dr. I G. A. K. Wardani

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
1998**

PEMBERDAYAAN GURU: suatu usaha peningkatan mutu pendidikan

Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang mulia,

Ijinkanlah terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Mahas Esa kerana atas kehendak-Nya-lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Terbuka yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam upacara Dies Natalis Universitas Terbuka ke-14 ini. Saya mengawali orasi ilmiah ini dengan mengutip ucapan John Dewey yang berbunyi :

"Education is not preparation for life, it is life itself".

Pendahuluan

Hadirin yang mulia,

Sebagaimana dengan bidang lainnya, bidang pendidikan di Indonesia tampaknya tak pernah lepas dari berbagai masalah. Angin reformasi yang berembus dengan sangat deras pada bulan Mei 1998 telah pula menerpa dunia pendidikan. Berbagai pemikiran mulai dikaji ulang, berbagai tatanan yang selama ini dianggap mapan mulai digoyang oleh terpaan angin reformasi. Hal ini tentu dapat dipahami karena reformasi yang diniatkan memang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, serangkaian pertemuan yang membahas reformasi dalam bidang pendidikan telah dilakukan di berbagai lembaga pendidikan. Reformasi dalam bidang pendidikan tentu diniatkan akan membawa angin segar yang dapat memicu dan memacu pembangunan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berbagai pengkajian ulang perlu dilakukan sebagai landasan untuk menetapkan strategi pembangunan yang lebih solid, sehingga tujuan yang diniatkan benar-benar dapat terwujud.

Jenjang pendidikan dasar, yang menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Sekolah Dasar (SD) enam tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tiga tahun, tidak terlepas dari sasaran pengkajian ulang. Mutu pendidikan yang sejak tahun 60-an menjadi salah satu masalah pokok pendidikan, di samping masalah pemerataan, makin gencar dipertanyakan. Hal ini menjadi sangat penting karena mutu pendidikan dasar akan sangat menentukan mutu pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pertanyaan pokok mengenai mutu pendidikan yang muncul dalam berbagai diskusi akhir-akhir ini, terutama berkisar pada kurang

mampunya lulusan SD, SLTP, bahkan SMU untuk bernalar dan berpikir kritis, serta masih sangat tergantungnya mereka kepada guru. Kemampuan siswa untuk mandiri hampir tidak terwujud, sehingga prakarsa siswa untuk memulai sesuatu merupakan hal yang langka. Yang banyak dikuasai oleh para siswa adalah pengetahuan faktual yang dihafal dengan cermat karena itulah sebagian besar yang dituntut dalam ujian akhir. Rendahnya Nilai Ebtanas Murni (NEM), lebih-lebih untuk tahun ajaran 1997 / 1998 juga dipertanyakan. Pangkal penyebab dari semua ini tentu sangat banyak, tetapi tudingan utama banyak ditujukan kepada guru karena gurulah yang merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan secara teratur dan terprogram dengan siswa. Guru dianggap memegang posisi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang sekaligus merupakan pencerminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi di jenjang pendidikan dasar semestinya terletak pada upaya memberdayakan guru.

Hadirin yang terhormat,

Menyimak pernyataan di atas, barangkali banyak yang bertanya-tanya, mengapa selalu guru yang menjadi sasaran. Mengapa bukan orang tua, kurikulum, siswa, atau faktor lain yang juga menentukan mutu pendidikan? Mengapa harus guru? Pertanyaan ini tentu menggambarkan betapa banyaknya pendapat atau tanggapan atau kritik yang ditujukan kepada guru; dan sekaligus menggambarkan kepedulian masyarakat terhadap mutu guru. Oleh karena itu, pengkajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan guru diharapkan akan mampu memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi guru, sehingga pemahaman masyarakat tentang guru akan menjadi lebih realistis. Di samping itu, pembahasan yang difokuskan pada upaya pemberdayaan guru bermaksud mencari cara-cara yang dianggap efektif untuk membuat guru mampu melakukan tugasnya secara profesional. Dengan demikian, orasi ilmiah ini diharapkan mampu membuka wawasan para pendidik terhadap kondisi guru Indonesia sehingga terpacu untuk berperan serta dalam usaha pemberdayaan guru.

Program pemberdayaan guru yang efektif tentu harus dikembangkan dengan melakukan berbagai pengkajian serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan guru. Oleh karena itu, pembahasan tentang pemberdayaan guru ini akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu (1) profesi guru, (2) profil guru pendidikan dasar, (3) pendidikan dan pembinaan guru, serta (4) program pemberdayaan guru. Kajian tentang profesi guru akan memberikan gambaran tentang hakikat profesi guru yang mencakup persyaratan untuk memegang

profesi guru, kemungkinan pengembangan karir guru, serta citra masyarakat terhadap profesi guru. Profil guru pendidikan dasar akan mengungkapkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai guru SD dan SLTP. Data kuantitatif berkaitan dengan jumlah, sebaran, dan latar belakang pendidikan guru, sedangkan data kualitatif akan mencakup kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya serta kondisi sosial ekonomi guru. Beranjak dari profil guru ini akan dikaji pendidikan dan pembinaan guru serta usaha-usaha yang telah dilakukan dalam memberdayakan guru. Dengan mempertimbangkan ulasan dalam ketiga bidang tersebut, terutama ulasan tentang profil guru serta usaha yang pernah dilakukan dalam memberdayakan guru, akan dikembangkan upaya pemberdayaan guru yang dianggap efektif. Akhirnya, orasi ini akan ditutup dengan membahas implikasi pemberdayaan guru bagi lembaga dan pihak yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan guru.

Profesi Guru

Hadirin yang mulia,

Pekerjaan sebagai guru sudah dikenal sejak lama. Dalam Wiracarita Mahabharata, keluarga Pandawa dan Korawa berguru kepada Bhagawan Drona. Jika disimak wiracarita tersebut secara cermat, tampaknya harkat seorang guru sangat tinggi di mata muridnya. Baik Pandawa maupun Kaurawa sangat menghormati gurunya, pantang bagi mereka untuk melawannya. Arjuna masih tetap menghormati Drona sebagai guru, meskipun Drona sudah memihak kepada Kaurawa, yang merupakan musuh Pandawa. Citra guru seperti itu masih terasa sampai lebih kurang akhir tahun 50-an. Pekerjaan guru dianggap pekerjaan yang mulia, yang sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia; oleh karena itu, yang dapat menjadi guru adalah orang-orang pilihan. Ungkapan guru dapat digugu dan ditiru tampaknya mencerminkan citra pekerjaan guru. Namun kemudian, citra yang tinggi tersebut berangsur-angsur memudar, meskipun perannya dalam pengembangan sumber daya manusia tidak pernah diragukan. Guru tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang merupakan pilihan utama, tetapi sebagai pilihan terakhir. Sejalan dengan itu, rasa hormat kepada guru juga menurun. Adanya perkelahian antara guru dan siswa, guru yang dikeroyok / dipukul oleh siswa / orang tua siswa atau sebaliknya, guru memukul/menyakiti siswa, serta berbagai kasus lain yang diberitakan oleh berbagai media massa, mencerminkan menurunnya citra guru. Pangkal penyebab menurunnya citra tersebut tentu pula sangat beragam. Mulai

dari rekrutmen calon guru, yang tidak dapat lagi memilih calon-calon terbaik karena kebutuhan akan guru sangat besar, sementara calon yang ingin menjadi guru terbatas; kemudian diikuti oleh menurunnya kualitas kemampuan guru; dan tidak kalah pentingnya kesejahteraan guru yang morat-marit. Semua itu berakumulasi menjadikan pekerjaan guru sebagai pekerjaan yang seolah-olah tidak menarik untuk dipilih, kecuali kalau terpaksa.

Terlepas dari citra guru yang mulai memudar, pekerjaan sebagai guru pada hakikatnya merupakan pekerjaan profesional yang hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang mendapat pendidikan khusus untuk itu. Keprofesionalan pekerjaan guru memang masih dipertanyakan karena berbagai kasus yang terjadi di dunia pendidikan memberi peluang untuk pertanyaan seperti itu. Anggapan bahwa pekerjaan guru dapat dipegang oleh siapa saja, merupakan salah satu cerminan adanya keraguan tersebut. Tidak terdapatnya perbedaan yang mendasar antara kinerja guru yang dididik khusus dengan kinerja seorang guru tembak, yaitu guru yang tidak pernah dididik menjadi guru tetapi mengajar karena terpaksa, menyebabkan makin gencarnya pertanyaan tentang keprofesionalan guru. Benarkah **guru** merupakan pekerjaan profesional? Untuk menjawab pertanyaan ini dan agar dapat meyakinkan apakah pekerjaan guru sebuah profesi atau pekerjaan yang profesional, terlebih dahulu perlu dikaji ciri-ciri pekerjaan profesional.

Hadirin yang terhormat,

Pekerjaan profesional, menurut Darling-Hammond & Goodwin (1993) paling tidak menunjukkan tiga ciri. **Pertama**, meskipun pekerjaan ini dilakukan berdasarkan ilmu tertentu, namun penerapannya tidak dilakukan secara rutin, tetapi berdasarkan kepentingan individu dalam setiap kasus. **Kedua**, memasuki satu profesi haruslah dikontrol secara ketat oleh anggota profesi tersebut melalui **mekanisme internal yang terstruktur**, yang mengatur rekrutmen, pelatihan, pemberian lisensi (ijin kerja), serta ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai. **Ketiga**, kaum profesional mempunyai tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya; dan komitmen ini haruslah mengesampingkan kepentingan kedua seperti target pribadi atau politik. Selanjutnya ditekankan pula bahwa praktik profesional ditandai oleh usaha untuk menjadi *client oriented and knowledge based*. Ini berarti, bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani klien, seorang profesional harus selalu mengacu kepada teori atau ilmu yang solid (*codified body of knowledge*) yang menjadi acuan profesi tersebut. Ia tidak boleh bekerja secara serabutan atau hanya mengandalkan kebiasaannya dalam melayani klien

yang lain karena setiap klien mempunyai kebutuhan yang unik. Di samping itu, perlu ditekankan pula bahwa keprofesionalan seseorang bukan merupakan dikotomi, melainkan satu kontinum atau rentangan yang menggambarkan tingkat kesesuaian layanan yang diberikannya dengan ukuran standar yang disepakati. Rentangan ini mulai dari pemula (novice), yaitu mereka yang baru lulus dan memasuki pekerjaan profesional sampai kepada pakar (expert), yaitu mereka yang sudah kenyang makan garam dalam pekerjaan tersebut. Dikaitkan dengan profesi guru, Riel (1998, hal. 172) yang menggambarkan empat karakteristik guru dalam sebuah sekolah pada tahun 2005, menyatakan bahwa guru mengikuti jalur karir mulai dari *entry ke mentor, sampai ke master teacher*. Konsep kontinum ini membawa implikasi bahwa tingkat keprofesionalan seseorang berkembang, berdasarkan pengalaman dalam melayani kliennya serta berbagai pengkajian dan pendalaman yang dilakukannya.

Profesionalisme ditandai oleh dua pilar penyangga utama, yaitu layanan ahli yang aman yang menjamin kemashalatan klien, serta pengakuan dan penghargaan dari masyarakat (Raka Joni, 1989; Konsorsium Ilmu Pendidikan, 1993). Pilar yang pertama, yaitu layanan ahli harus mampu ditunjukkan dengan meyakinkan, sehingga masyarakat merasa aman menerima layanan tersebut. Sebaliknya, pengakuan dan penghargaan dari masyarakat terhadap satu profesi akan memperkokoh keterandalan profesi tersebut. Tentu saja pengakuan dan penghargaan ini tidak dapat dilepaskan dari layanan ahli yang diterima masyarakat. Makin andal layanan ahli yang diberikan dan makin tinggi rasa aman yang dirasakan masyarakat, akan makin tinggi penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Layanan ahli yang diberikan haruslah didasarkan pada penguasaan bidang ilmu yang diakui sebagai landasan profesi tersebut karena profesionalisme mulai dengan preposisi: *knowledge must inform practice* (Darling-Harmond & Goodwin, 1993, hal. 31).

Hadirin yang terhormat,

Dengan menyimak ciri-ciri pekerjaan profesional seperti di atas, tampaknya ciri-ciri pekerjaan guru sebagai satu profesi dapat diidentifikasi. Pernyataan yang dikutip oleh Zumwalt, K. (1989) yang mengatakan bahwa: *knowledgeable teachers are not technicians, but professionals – worthy and able to make decisions and plans based on principled knowledge that is adapted to the particulars of their teaching situation, their students, their unique experience and their own special insight, self-knowledge, values, and*

commitments (hal. 173), dapat menggambarkan karakteristik guru yang profesional. Dari pernyataan tersebut dapat disimak bahwa guru yang ahli bukan seorang teknisi, tetapi seorang profesional yang layak dan mampu mengambil keputusan serta membuat rencana yang didasarkan pada pengetahuan atau ilmu yang disesuaikan dengan situasi, siswa,awasannya sendiri, nilai, dan komitmennya. Dengan perkataan lain, seorang guru profesional harus mampu mengambil keputusan situasional dan transaksional, sebagaimana yang diungkapkan oleh T. Raka Joni (1989). Keputusan situasional diambil guru ketika merancang pembelajaran, sedangkan keputusan transaksional dilakukan guru ketika interaksi dalam kelas sedang berlangsung. Karakteristik guru seperti ini sejalan dengan tuntutan *client oriented* yang merupakan salah satu ciri pekerja profesional, dan juga merupakan salah satu aspek layanan ahli seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dari segi penyiapan guru, program pendidikan guru paling tidak harus sama dengan program penyiapan profesi lain seperti sekolah kedokteran, yang memberikan kesempatan menimba pendidikan umum yang menantang, pengetahuan bidang studi yang mendasari praktik, kesempatan untuk menghayati latihan yang efektif untuk memangku pekerjaan, serta kesempatan untuk mengembangkan wawasan / filosofi profesinya (Brameld, Th., 1965). Di Indonesia, guru memang dipersiapkan dalam pendidikan khusus, yaitu dalam lembaga pendidikan guru. Bidang ilmu keguruan yang disajikan dalam kelompok mata kuliah dasar keahlian (MKDK) merupakan bidang ilmu yang melandasi pekerjaan sebagai guru. Mata kuliah keahlian (MKK) memberikan bekal keahlian dalam bentuk penguasaan bidang studi dan cara penyajiannya. Sedangkan program pengalaman lapangan (PPL) menyediakan kesempatan untuk berlatih secara bertahap dan sistematis, mulai dari pengenalan lapangan, latihan keterampilan terbatas, latihan terbimbing, sampai kepada latihan mandiri. Di samping itu, mata kuliah umum (MKU), yang merupakan landasan kepribadian / personal sosial bagi setiap insan pendidikan tinggi, termasuk guru, juga merupakan mata kuliah wajib di lembaga pendidikan guru. Dengan program seperti ini, para calon guru diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang merupakan persyaratan keluaran (*exit requirement*) bagi calon guru. Dari segi ini, tampaknya salah satu ciri profesionalisme yang dikemukakan oleh Brameld, Th. (1965) dan Darling-Hammond & Goodwin (1993) sudah terpenuhi. Namun, kalau dilihat dari segi kontrol yang ketat melalui mekanisme internal yang terstruktur, terutama pada rekrutmen, tampaknya kondisi pendidikan guru di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat tersebut. Hal ini terutama berpangkal dari citra

pekerjaan guru yang tidak terlalu menarik, sehingga mereka yang ingin masuk ke pendidikan guru, sebagian besar bukan putra-putra terbaik bangsa.

Dari segi penghargaan dan pengakuan masyarakat dan pemerintah (untuk situasi Indonesia), keputusan Menpan no. 26/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru merupakan pengukuhan jabatan guru sebagai jabatan profesional. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, jabatan guru diakui sebagai jabatan fungsional, yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Karir guru terbuka sampai ke jenjang yang paling tinggi, dari guru pratama sampai kepada guru utama. Keputusan itu juga memuat rincian tentang bidang jabatan guru, yang terdiri dari empat kelompok, yaitu pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar-mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Hal ini membuktikan dan sekaligus mengukuhkan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, yang seyogyanya pula diikuti oleh sistem imbalan yang membetahkan.

Profil Guru Pendidikan Dasar

Hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan dasar 9 tahun terdiri dari Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 tahun. Oleh karena itu, profil guru yang dibahas meliputi guru SD dan guru SLTP. Menurut statistik persekolahan tahun 1996/1997 (Minister of Education and Culture, 1998), jumlah guru SD di seluruh Indonesia (negeri dan swasta) adalah 1.327.178 orang, tersebar di 27 propinsi. Propinsi dengan jumlah guru SD terbanyak adalah Jawa Timur (222.948 guru) dan Jawa Barat (212.775 guru), sedangkan propinsi dengan jumlah guru paling kecil adalah Timor Timur (6.620 guru) dan Bengkulu (12.366 guru). Sebaran guru dapat dikatakan tidak proporsional sebagaimana yang ditemukan dalam Studi Kebijakan tentang Pengadaan, Pengangkatan, Penempatan, dan Pembinaan Guru Sekolah Dasar (Setijadi, 1992). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa ada kecamatan yang kekurangan guru, sementara ada pula kecamatan yang kelebihan guru. Dari segi rasio guru-murid, perbedaan memang tidak terlampau mencolok: rasio yang terkecil yaitu 14 terdapat di propinsi Sulawesi Utara, sedangkan yang terbesar, yaitu 28 terdapat di Jawa Barat. Melihat data ini, tampaknya dari segi jumlah, secara nasional tidak terdapat kekurangan guru. Namun karena sebaran yang tidak merata, masih terdapat kekurangan guru, terutama di daerah terpencil,

seperti yang terungkap dalam pertemuan Mendikbud Yuwono Sudarsono dengan para guru dari 27 propinsi (Republika, 19 Agustus 1998). Dari segi latar belakang pendidikan, data Statistik Persekolahan 1996-1997 menunjukkan bahwa pendidikan terendah guru SD adalah setingkat SLTP (74.544 orang), sedangkan yang tertinggi adalah sarjana dengan jumlah 45.160 orang. Sebagian besar guru SD berpendidikan setingkat SLTA dengan jumlah 930.382 orang, sementara yang berpendidikan diploma tercatat 40.503 orang. Tentu saja pada saat ini data tersebut tidak akurat lagi karena Program Penyetaraan D II Guru SD yang dikelola oleh FKIP Universitas Terbuka telah meluluskan lebih dari 200 ribu guru SD.

Jumlah seluruh guru SLTP negeri adalah 430.981 orang (Minister of Education and Culture, 1998), tersebar di 27 propinsi. Tidak jauh berbeda dari sebaran guru SD, propinsi dengan jumlah guru SLTP terbanyak adalah Jawa Timur (69.890 guru) dan Jawa Tengah (61.595 guru), sedangkan propinsi dengan jumlah guru SLTP terkecil adalah Timor Timur (1.781 guru) dan Kalimantan Tengah (3.580 guru). Dari segi latar belakang pendidikan, ternyata guru SLTP sudah ada yang berpendidikan S2 (Master), yaitu sebanyak 212 orang. Bagian terbesar dari guru SLTP ini berpendidikan Diploma (237.343 orang), serta sisanya berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana. Melihat latar belakang pendidikan para guru SLTP ini, tampaknya kualifikasi guru sudah lumayan; tidak ada lagi yang hanya berlatar belakang pendidikan SLTA, dan sudah ada yang berpendidikan S2. Kelompok guru SLTP yang telah berpendidikan sarjana dan S2 jelas merupakan modal sumber daya manusia yang semestinya dapat menjadi pelopor dalam usaha pengembangan profesi, yang tentu saja menuju kepada peningkatan mutu pendidikan.

Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang terhormat,

Dari segi profil kemampuan guru, tampaknya berbagai keluhan tentang mutu pendidikan dapat mencerminkan kinerja guru, meskipun yang menyumbang terhadap mutu pendidikan bukan hanya guru, tetapi juga berbagai faktor lain. Berbagai hasil penelitian serta pengamatan informal menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih sangat mendominasi kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Konsultan Pendidikan Menengah Umum -Tim Dikmenum (Nielson. D. dkk, 1996; Wardani, 1996) menunjukkan bahwa masih banyak guru yang bekerja secara rutin, artinya agenda kerja guru dari hari ke hari tetap sama, meskipun siswa yang dihadapi berbeda-beda. Hampir dalam setiap pelajaran ada ceramah dan kerja kelompok, meskipun tidak jelas benar format kerja kelompok tersebut. Pelajaran IPA yang seharusnya memberi kesempatan

kepada siswa untuk mengalami berbagai gejala alam melalui eksperimen atau kegiatan lain, juga didominasi oleh ceramah (Nasoetion, N., 1996). Yang lebih mengesankan adalah penguasaan guru terhadap konsep yang akan disajikan juga belum mantap. Penelitian Jiono (1992) menunjukkan bahwa hanya 57% dari guru IPA SMP yang menguasai materi biologi dan fisika untuk SMP. Tentu dapat dibayangkan apa yang diperoleh siswa dari guru yang seperti itu. Selanjutnya hasil-hasil penelitian Tim Dikmenum serta pengamatan informal juga menunjukkan bahwa usaha guru untuk mengaktifkan siswa hampir tidak tampak. Selama pelajaran berlangsung siswa hanya menunggu, tidak ada yang bertanya, apalagi yang mempertanyakan pertanyaan. Guru tidak memfasilitasi terjadinya interaksi guru-siswa, apalagi interaksi siswa-siswa. Walaupun guru mengajukan pertanyaan, pertanyaan tersebut lebih banyak bersifat ingatan dan sebagian besar dijawab serentak oleh siswa. Kemampuan siswa untuk berpikir dan bernalar masih jarang mendapat perhatian dari guru; oleh karena itu, tidak mengherankan jika ternyata guru cukup puas dengan kemampuan menghafal para siswa. Kesadaran untuk membentuk dampak pengiring (*nurturant effect*) di samping mencapai tujuan pembelajaran juga belum banyak teramati. Guru lebih banyak sibuk mengurus ketercapaian targetnya daripada memikirkan kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan dampak iringan seperti kemampuan bekerja sama, kesediaan untuk bertanggung jawab, kebiasaan berpikir kritis, atau kebiasaan untuk menerima pendapat orang lain tanpa merasa dikalahkan atau diremehkan. Tentu perlu dicatat pula, bahwa di samping kinerja guru seperti yang digambarkan di atas, masih terdapat guru yang mengelola kegiatan pembelajaran dengan kemampuan yang tinggi. Penelitian Tim Dikmenum menunjukkan adanya guru IPA yang mengelola pembelajaran dengan memberikan kesempatan langsung kepada siswa untuk menemukan konsep dari percobaan yang dilakukannya; namun, jumlah guru seperti itu jauh lebih kecil dari pada mereka yang melakukan tugas secara rutin. Dari segi pelatihan, pada umumnya, para guru SLTP sudah pernah mengikuti penataran / pelatihan, baik melalui Pemantapan Kerja Guru (PKG), Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG), maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Namun, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, tekanan utama diletakkan pada pengembangan perangkat pembelajaran seperti pembuatan Analisis Mata Pelajaran (AMP), menyusun Lembar Kegiatan Siswa (LKS), serta menyusun Rencana Pembelajaran. Jantung pembelajaran, yaitu interaksi di dalam kelas atau lebih tepat lagi “apakah siswa belajar”, tidak mendapat tekanan yang memadai, meskipun kadang-kadang ada kegiatan simulasi. Teknik-teknik pembelajaran untuk mengaktifkan siswa serta teknik-teknik khusus

pembelajaran bidang studi, yang disebut sebagai *subject specific pedagogy*, belum mendapat perhatian yang memadai.

Hadirin yang mulia,

Melihat gambaran seperti di atas dapat diperkirakan bahwa kemampuan untuk memberikan layanan ahli masih belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Kinerja guru yang berkaitan dengan kurikulum, yang menurut Raka Joni (1998) bervariasi mulai dari operator kurikulum yang bekerja secara mekanistik sampai dengan perencana lingkungan belajar yang melaksanakan tugasnya secara profesional, juga merupakan gambaran nyata di lapangan. Guru yang hanya mengikuti petunjuk dalam mengelola pembelajaran masih banyak dijumpai. Bagi guru seperti ini, yang penting adalah apa yang dikerjakannya sesuai dengan petunjuk kepala sekolah atau penilik atau petunjuk dalam buku. Mereka tidak pernah mempertanyakan mengapa harus berbuat seperti itu, dan tidak pula pernah memikirkan apakah petunjuk tersebut sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Yang lebih parah lagi adalah guru yang hanya berperan sebagai **pengabar isi buku teks** (Raka Joni, 1998). Guru seperti ini mungkin tidak pernah melihat kurikulum, apalagi memahami dan menjabarkannya. Baginya, buku teks adalah acuannya dalam mengajar, sehingga rencana pembelajaran yang dibuatnya didasarkan pada isi buku teks yang diikuti secara patuh, tanpa pernah mempertanyakan kesahihan atau kemanfaatannya. Contoh nyata dari kinerja guru seperti ini, adalah guru enggan menerima jawaban siswa yang berbeda dari yang tercantum dalam buku teks, meskipun jawaban siswa tersebut memang masuk akal. Kondisi seperti ini tentu saja membuat siswa frustrasi sehingga mereka malas memikirkan sesuatu yang lain daripada yang diminta guru; dan sebagai akibatnya, motivasi belajar siswa menurun. Setingkat lebih lumayan dari sekedar pengabar buku teks adalah guru yang sekedar menyampaikan pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum. Guru secara setia mengangkut pokok bahasan ke dalam kelas dan menyampaikannya kepada siswa. Guru tidak peduli apakah pokok bahasan itu dapat dikuasai oleh siswa, atau apakah pokok bahasan tersebut bermanfaat bagi siswa. Di samping guru yang berperan sebagai operator kurikulum, masih terdapat, meskipun dalam jumlah yang terbatas, para guru yang berperan sebagai perancang lingkungan belajar. Guru seperti ini juga merupakan rentangan dari pelaksana rencana pembelajaran secara kaku, sampai dengan yang mampu melakukan perubahan / penyesuaian selama pembelajaran berlangsung. Jumlah guru yang sangat setia kepada rencana pembelajaran, sehingga mengikutinya secara kaku dapat diperkirakan jauh lebih banyak

daripada jumlah mereka yang mampu dan mau melakukan penyesuaian; yang menurut T. Raka Joni (1998) disebut sebagai *designer of fluid learning environments*, yang berarti guru mampu merancang lingkungan belajar yang selalu berubah, yang selalu menuntut diadakannya berbagai penyesuaian.

Dilihat dari keadaan sosial ekonomi atau kesejahteraan para guru, setiap orang di Indonesia ini tentu sepakat untuk mengatakan bahwa kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang relatif kecil masih kerap dipotong untuk memenuhi berbagai kewajiban, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono merasa perlu mendorong para guru SD agar memiliki keberanian untuk menolak berbagai jenis pungutan terhadap gaji mereka (Republika, 19 Agustus 1998, hal. 9). Tunjangan fungsional yang diterima guru, yang sebenarnya merupakan penghargaan dan pengakuan bagi profesi guru, hampir tidak ada artinya, lebih-lebih jika dibandingkan dengan melambungnya harga-harga dalam situasi krisis moneter sekarang ini. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika guru harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragam pekerjaan dijalankan oleh para guru, mulai dari tukang ojek, tukang becak, pedagang, ataupun sopir angkutan umum. Tampaknya bagi para guru, rasa malu untuk mengerjakan pekerjaan yang jauh dari standar pekerjaan seorang guru harus dibuang jauh-jauh. Masih lumayan kalau para guru mendapat pekerjaan sampingan yang ada hubungannya dengan tugas sebagai guru, seperti membuka kursus atau memberikan pelajaran tambahan. Ungkapan-ungkapan yang pernah dilontarkan di berbagai media massa juga membuktikan parahnya kondisi kesejahteraan guru. Pendapat yang mengatakan: kalau ingin kaya janganlah menjadi pegawai negeri, lebih-lebih janganlah menjadi guru; tampaknya memperkuat pernyataan bahwa kesejahteraan guru memang memprihatinkan. Situasi seperti ini tentu sangat mempengaruhi kinerja guru. Guru tidak mampu lagi memusatkan perhatiannya pada tugas utama sebagai guru, sehingga tidak mustahil guru datang ke sekolah hanya untuk memenuhi tugas rutin. Bahkan, kadang-kadang pekerjaan sampingan yang dilakukan guru menjadi prioritas utama, sehingga tugas pokoknya sebagai guru hanya untuk mempertahankan posisinya sebagai pegawai negeri.

Pendidikan dan Pembinaan Guru

Hadirin yang mulia,

Penyiapan guru dilakukan secara nasional di sekolah / lembaga yang khusus mendidik guru. Pendidikan guru yang pada awalnya ditangani oleh dua

direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), sejak tahun 1990, secara bertahap hanya ditangani oleh Ditjen Dikti. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan peningkatan kualifikasi guru SD. Calon guru SD yang semula dididik di Sekolah Pendidikan Guru (SPG), kemudian dididik di IKIP / FKIP dalam Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sementara itu, calon guru SLTP dipersiapkan pada program Diploma dan program Sarjana. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, program pendidikan guru dibenahi berdasarkan hasil kajian terhadap program sebelumnya. Kurikulum D II PGSD Prajabatan yang diberlakukan sejak tahun akademik 1990 / 1991 disempurnakan pada tahun 1995 berdasarkan berbagai kajian empirik dan teoritis. Masukan dari lapangan yang berupa keluhan atas kinerja para lulusan dan hasil kaji ulang kurikulum yang sedang berjalan, merupakan pertimbangan utama dalam penyempurnaan program ini. Berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru juga telah dilakukan. Peningkatan kualifikasi para pendidik guru (dosen PGSD dan PGSM) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para dosen untuk melanjutkan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pelatihan jangka pendek, baik di dalam maupun di luar negeri, juga telah diadakan. Kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan calon guru, seperti pelatihan guru pamong telah dilakukan dengan tujuan agar para calon guru mendapat kesempatan untuk menghayati pendidikan dan latihan yang memungkinkan mereka menjadi calon guru yang profesional. Usaha-usaha perbaikan ini masih berjalan terus karena perbaikan memang tidak akan pernah berhenti.

Hadirin yang terhormat,

Dalam hal pembinaan guru, tampaknya sudah cukup banyak yang dilakukan, baik melalui pendidikan formal yang menuju kepada peningkatan kualifikasi, maupun pelatihan-pelatihan jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para guru. Di samping itu, sistem pembinaan guru secara rutin, juga telah ditata. Dalam pekerjaannya sehari-hari, para guru dibina oleh kepala sekolah dan penilik / pengawas. Dari sistem pembinaan guru secara rutin ini dapat ditemukan celah yang menjurus kepada rendahnya kualitas kinerja guru. Para penilik dan pengawas tidak sepenuhnya dapat melakukan tugasnya secara mantap karena latar belakang yang kadang-kadang tidak sesuai. Di samping itu, para penilik atau pengawas belum sepenuhnya dibekali dengan kemampuan untuk melakukan pembinaan, sehingga pembinaan yang dilakukan lebih bersifat administratif daripada bersifat akademik. Banyaknya

penilik atau pengawas yang diangkat dari kepala sekolah atau pejabat yang hampir tidak mempunyai latar belakang yang sama dengan bidang kepengawasannya membuka celah yang lebih lebar untuk mempertanyakan keefektifan pembinaan ini. Dalam hal pelatihan atau penataran guru, juga sudah banyak yang dilakukan sejak awal tahun 70-an. Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D) yang melakukan penataran keliling bagi para guru SD sudah banyak menyumbang dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, dalam bentuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan mengembangkan buku teks. Selanjutnya Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) yang meningkatkan kemampuan pendidik guru, baik di tingkat perguruan tinggi (IKIP / FKIP) maupun di tingkat sekolah yaitu guru SPG, juga sudah banyak menghasikan gagasan yang sampai sekarang masih terus disebarluaskan. Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) serta Perangkat Pengajaran Mikro berupa 8 keterampilan dasar mengajar merupakan contoh produk P3G yang sampai sekarang masih dirasakan kemanfaatannya. Sayangnya, gagasan-gagasan inovatif tersebut seperti terhenti hanya pada generasi yang menerimanya, sehingga dampak penulatan yang direncanakan tidak terjadi sebagaimana mestinya. Di samping itu, tidak adanya koordinasi antar proyek menyebabkan gagasan yang dikembangkan dalam satu proyek seperti berhenti ketika proyek tersebut berakhir. Selain itu, berbagai pelatihan dan penataran yang diselenggarakan akhir-akhir ini seolah-olah tumpang tindih. Tidak jarang satu lembaga mengadakan kegiatan penataran tanpa koordinasi dengan lembaga lain, sehingga guru yang sama mendapat penataran yang berbeda tentang materi yang sama. Dapat dibayangkan dampak dari penataran yang seperti ini. Program penataran yang kadang-kadang disusun secara tergesa-gesa, hampir tidak banyak yang menyentuh jantung pembelajaran yaitu interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Program PKG dan MGMP yang pernah dianggap sangat berhasil, ternyata juga tidak banyak memberikan tekanan pada masalah utama guru, yaitu bagaimana membuat siswa mau dan mampu belajar. Tampaknya kesadaran bahwa belajar hanya terjadi jika yang belajar (siswa) aktif terlibat secara optimal, belum mendasari penyusunan program penataran ini. Dengan demikian, program pembinaan guru yang dilakukan melalui berbagai proyek masih belum mampu menjawab masalah mutu pendidikan.

Hadirin yang terhormat,

Berkaitan dengan pembinaan guru yang menuju kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, program penyetaan bagi para guru yang sudah bertugas menjadi guru telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan tuntutan

perkembangan jaman yang mempersyaratkan adanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga persyaratan kualifikasi formal untuk guru juga ditingkatkan. Kualifikasi guru SD yang pada tahun 50-an hanya sampai lulusan Sekolah Guru B (SGB- setingkat SLTP) ditingkatkan secara bertahap sampai pada jenjang Diploma II (SK Mendikbud No. 0854 /U/1989). Untuk tingkat sekolah menengah, meskipun secara resmi belum ada surat keputusan yang mengatur peningkatan kualifikasi guru, namun secara sistematis peningkatan tersebut telah diadakan melalui berbagai proyek. Adanya Proyek Penyetaraan D III Guru SMP dan kemudian Proyek Pendidikan Guru Sekolah Menengah (Proyek PGSM) yang menyelenggarakan program S1 PGSM merupakan bukti adanya usaha pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi guru. Sebagai pembinaan, peningkatan kualifikasi guru tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan guru, tetapi tujuan akhirnya adalah peningkatan kemampuan profesional guru, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjawab masalah mutu pendidikan. Untuk meyakinkan tercapainya tujuan akhir ini, berbagai penyempurnaan juga telah dilakukan. Kurikulum Program Penyetaraan D II PGSD telah disempurnakan berdasarkan berbagai masukan dari lapangan serta mengacu kepada Kurikulum D II PGSD Prajabatan. Berbagai pembenahan, termasuk kebijakan dalam penyelenggaraan, seperti perubahan kebijakan dalam pelaksanaan tutorial dan tugas mandiri, juga telah dilakukan. Namun, keluhan terhadap kinerja guru masih tetap bergema.

Program Pemberdayaan Guru

Hadirin yang mulia,

Istilah pemberdayaan akhir-akhir ini menjadi populer, meskipun terbatas pada kalangan tertentu. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dengan kata dasar *empower*, yang secara harfiah berarti membuat berkuasa atau berwenang. Dalam kaitan dengan pemberdayaan guru, istilah pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk membuat guru berdaya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, serta mampu mencari alternatif pemecahan jika menghadapi masalah, sehingga ia benar-benar merasa mempunyai wewenang sebagai guru.

Usaha pemberdayaan guru perlu dilakukan karena kenyataan di lapangan yang tergambar dalam profil guru seperti yang sudah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pada umumnya guru masih perlu diberdayakan. Memang

ada guru yang berkemampuan tinggi, baik dalam penguasaan materi ajaran maupun dalam mengelola pembelajaran serta mampu menyikapi tugas-tugasnya secara profesional, namun jumlah guru yang seperti itu masih jauh lebih kecil daripada mereka yang masih memerlukan pemberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan guru merupakan satu keharusan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan karena, seperti sudah diuraikan di depan, guru merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu secara terprogram dengan siswa. Tujuan utama pemberdayaan guru sebagaimana yang sudah disinggung di depan adalah membuat guru mampu melaksanakan tugas sebagai guru yang profesional. Ini berarti bahwa usaha pemberdayaan guru bukan hanya berkaitan dengan masalah peningkatan kemampuan dalam memberikan layanan ahli, tetapi juga mengusahakan penghargaan yang setimpal, yang membuat guru betah melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Dari uraian di atas dapat disimak bahwa program pemberdayaan guru terdiri dari dua komponen, yaitu komponen peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan ahli kepada para siswa, dan komponen penghargaan yang membetahkan. Berkaitan dengan program yang pertama, tujuan program dapat dirinci sebagai berikut.

- Meningkatkan penguasaan guru terhadap materi ajaran.
- Meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, yang mencakup merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
- Memperkaya penguasaan guru terhadap berbagai strategi pembelajaran yang mengaktifkan dan memotivasi siswa.
- Meningkatkan kemampuan guru untuk mengenal kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta kemampuan untuk menemukan alternatif untuk mengatasi kelemahannya.

Setelah menetapkan tujuan program, kini muncul pertanyaan besar, bagaimana cara mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini akan dikaji berbagai kemungkinan sebagai berikut.

Hadirin yang terhormat,

Program pemberdayaan dapat dilakukan pada tingkat *pre-service*, yaitu di lembaga pendidikan guru yang sasarannya adalah para calon guru, serta pada tingkat *in-service*, yang diperuntukkan bagi guru yang sudah bertugas di lapangan. Baik pada tingkat *pre-service* maupun pada tingkat *in-service*, berbagai kiat berikut dapat dicobakan.

Meningkatkan Kemampuan dan Minat Membaca

Kemampuan membaca merupakan modal dasar dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh Mendikbud Yuwono Sudarsono, membaca dikategorikan sebagai kompetensi dasar pertama pendidikan dan kebudayaan (Kompas, 24 Agustus 1998). Membaca perlu dilatih, agar pemikiran konseptual, yang tercermin dari kegiatan menghubungkan rumus kata yang mewakili gejala dalam kenyataan hidup, menjadi lebih mantap. Pengamatan secara informal serta hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap Program Penyetaraan D II Guru SD (Wardani, dkk, 1995, & Udin, S. W. dkk, 1998) menunjukkan bahwa kemampuan membaca para guru SD masih terbatas. Ini terbukti dari banyaknya konsep yang tidak dapat ditangkap secara benar oleh para guru. Minat membaca yang kurang, tercermin dari tidak terselesaikannya tugas-tugas membaca yang diberikan oleh para tutor, sehingga mahasiswa cenderung meminta tutor menerangkan materi modul. Rendahnya minat membaca ini barangkali merupakan akumulasi dari banyak hal seperti keterbatasan waktu, tidak menariknya bahan bacaan, atau kurangnya kemampuan membaca. Jika masalahnya seperti ini, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan minat membaca?

Dalam pendidikan prajabatan, tampaknya hal ini lebih mudah dilakukan. Para dosen dapat meminta mahasiswa secara teratur membuat laporan artikel atau buku yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan, dan untuk mata kuliah tertentu difokuskan pada artikel atau buku yang berkaitan dengan materi ajaran. Tentu saja dalam hal ini perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku atau jurnal yang relevan, sebab tanpa tersedianya buku dan artikel yang diperlukan usaha ini akan menjadi sia-sia. Sejalan dengan yang dilakukan bagi calon guru, para tutor program penyetaraan dapat mempersyaratkan mahasiswa membaca modul yang disertai dengan tugas lanjutan, seperti mengidentifikasi istilah / kata yang dianggap sukar, memecahkan masalah yang hanya dapat dilakukan setelah membaca modul yang dipersyaratkan, atau tugas lain yang menantang. Bagi para guru yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal, peningkatan kemampuan dan minat membaca dapat dilakukan dengan menerbitkan jurnal atau majalah untuk para guru. Para guru diminta untuk menulis dalam jurnal tersebut dan membuat ulasan tentang artikel yang ada dalam jurnal atau majalah. Usaha ini tampaknya sudah sering dilakukan, namun kesinambungannya sering tidak terpelihara. Oleh karena itu, perlu ada guru yang memang mempunyai kemampuan dan minat baca yang cukup besar untuk menangani majalah bagi guru ini. Insentif

untuk menulis artikel sebenarnya cukup menarik karena dengan menulis artikel, para guru mendapat kredit untuk kenaikan pangkat. Masalahnya sekarang, bagaimana cara memanfaatkan insentif tersebut, sehingga guru terdorong untuk menulis, yang mau tidak mau akan membuat guru rajin membaca.

Menyajikan Model

Belajar dari model atau peragaan langsung merupakan cara yang cukup efektif, lebih-lebih dalam menguasai kemampuan yang berada dalam ranah keterampilan dan sikap. Cara ini tidak hanya terbatas pada anak-anak, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa. Mengelola pembelajaran menuntut berbagai keterampilan yang harus ditampilkan oleh guru ketika mengajar. Berbagai strategi mengajar atau model mengajar, terutama model yang mampu membuat siswa belajar dan mampu menumbuhkan dampak pengiring di samping dampak instruksional, perlu dimodelkan oleh dosen, tutor, atau penatar. Hubungan kologial yang akrab, yang saling menghagai karena didasarkan pada rasa saling membutuhkan bantuan yang bersifat profesional dapat dikembangkan oleh para guru, jika dosen, tutor, dan penatar mampu memodelkannya di antara mereka. Oleh karena keterampilan hanya dapat dikuasai melalui latihan serta pembentukan sikap dan nilai hanya dapat dikuasai melalui penghayatan, maka setelah calon guru atau guru mengamati model dan mendiskusikan hasil pengamatannya, mereka harus diberi kesempatan berlatih atau menghayati satu situasi secara memadai. Di samping itu, para dosen, tutor, dan penatar haruslah mampu menjadi model guru yang profesional. Artinya, mereka harus mampu menampilkan diri dengan berbagai peran, kadang-kadang sebagai sumber informasi, kadang-kadang sebagai fasilitator, atau suatu ketika sebagai guru yang mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar yang baik, termasuk memelihara hubungan interpersonal yang akrab dan sehat dengan siswa.

Memfokuskan Program Penataran pada Kebutuhan Guru

Hadirin yang terhormat,

Untuk memberdayakan guru, program penataran harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru, yang dapat diidentifikasi melalui berbagai hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan ataupun berbagai pengamatan informal. Hasil-hasil penelitian dan pengamatan informal menunjukkan bahwa masalah utama guru terletak pada dua aspek, yaitu penguasaan materi ajaran dan mengelola interaksi di dalam kelas. Berkaitan dengan kedua masalah ini, program penataran atau pelatihan tentu harus difokuskan pada kedua aspek

tersebut, di samping program titipan yang memang sering tidak dapat dihindarkan. Kegiatan pendalaman materi ajaran dapat dilakukan dengan memberikan informasi tambahan yang diikuti oleh diskusi yang intensif, yang memungkinkan para guru menguasai materi ajaran secara konseptual dan bukan sekedar menghafal materi tersebut. Dalam kaitan ini, kembali kegiatan membaca memegang peranan penting. Tugas membaca dalam pendalaman materi perlu diberikan selama penataran berlangsung, dengan tagihan yang jelas setelah mereka selesai membaca. Tagihan ini hendaknya benar-benar menantang guru untuk membaca dan dapat membedakan mereka yang benar-benar membaca dengan mereka yang hanya meniru pekerjaan teman. Aspek kedua, yaitu mengelola interaksi kelas memfokuskan perhatian pada “belajar siswa”. Pertanyaan mendasar dalam kaitan ini adalah apa yang semestinya dilakukan guru agar siswa mau dan mampu belajar, yang sebenarnya merupakan jantung pembelajaran. Menyajikan model, mengajak guru mendiskusikan model, dan kemudian memberikan kesempatan berlatih yang memadai, merupakan satu cara yang dapat ditempuh; disertai dengan bimbingan yang intensif, sehingga dapat diidentifikasi tingkat penguasaan guru. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam sistem penataran dan pelatihan. Sertifikat pelatihan atau penataran yang diberikan haruslah mampu menggambarkan prestasi peserta dalam penataran. Jelasnya, sertifikat ini tidak berupa keterangan telah menghadiri penataran (*certificate of attendance*), tetapi keterangan tentang tingkat penguasaan.

Membimbing dan Menggalakkan Guru Melakukan Penelitian Tindakan Kelas (Action Research)

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang mulai digalakkan dalam lembaga pendidikan guru, tampaknya merupakan sesuatu yang menjanjikan dalam memberdayakan guru. PTK yang didefinisikan sebagai suatu *self reflective inquiry* (Stephen Kemmis, dalam Hopkins, D., 1993 dan McNiff, J., 1992), yang dilakukan guru di dalam kelas, bertujuan untuk memperbaiki praktik pendidikan/pembelajaran yang dilakukan guru serta meningkatkan pemahaman guru terhadap praktik tersebut. Berbeda dengan praktik pembelajaran sehari-hari yang dilakukan guru, PTK mendorong guru mengenal/menyadari masalah yang dihadapinya, kemudian merencanakan upaya untuk mengatasinya. Upaya tersebut dilakukan secara eksplisit dan sistematis yang mengacu kepada kaidah-kaidah penelitian (Raka Joni, T., 1998). Inilah yang mencirikan PTK sebagai *systematic inquiry made public*.

Jika PTK diarahkan dan dikerjakan secara benar, ia akan mampu mendorong guru terlibat secara aktif dalam memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, di samping mampu mendorong guru menempatkan diri sebagai peneliti di kelasnya sendiri. Kondisi ini akan memungkinkan guru memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri secara profesional melalui studi terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kemampuan untuk melaksanakan PTK perlu digalakkan, tidak saja untuk calon guru, tetapi juga bagi para guru yang sudah bertugas di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program penataran guru.

Membudayakan Diskusi Ilmiah

Selama ini, tampaknya diskusi atau pertemuan ilmiah merupakan monopoli kalangan perguruan tinggi. Kalau pekerjaan guru memang diakui sebagai pekerjaan profesional, semestinya guru juga mampu dan mau melakukan diskusi atau pertemuan ilmiah. Pertemuan ini dapat diselenggarakan secara periodik, misalnya sebulan sekali, di tingkat kecamatan, kabupaten, atau di tingkat propinsi. Topik pertemuan bisa berupa perluasan wawasan untuk pengembangan profesi, dan terutama dapat diisi dengan laporan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh para guru. Untuk perluasan wawasan, dapat diundang berbagai pakar bidang studi atau pakar pendidikan, namun, bagian terbesar dari pertemuan ilmiah ini hendaknya diisi oleh para guru sendiri. Jika cara ini dilakukan secara teratur, kemampuan dan kepercayaan diri guru akan menjadi semakin mantap, sejalan dengan adanya kesempatan yang benar-benar relevan untuk mendapatkan kredit kenaikan jabatan.

Hadirin yang mulia,

Pemberdayaan guru dari segi kemampuan tidak akan banyak membantu, jika kesejahteraan guru tidak mendapat perhatian. Oleh karena itu, sudah saatnya kesejahteraan guru mendapat prioritas dalam anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga layanan ahli yang diberikan guru, benar-benar mendapat imbalan yang membetahkan. Meninjau ulang tunjangan fungsional guru, barangkali merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memang menimbulkan masalah pendanaan yang cukup besar, lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, namun, jika hal ini tidak dilakukan, mutu pendidikan yang diangan-angankan mungkin akan tetap merupakan angan-angan. Dampaknya mungkin tidak segera tampak seperti jebolnya jembatan yang dibangun dengan konstruksi

yang salah, tetapi dalam jangka panjang dampak ini akan sangat mengesankan berupa merosotnya kualitas sumber daya manusia.

Penutup

Hadirin yang terhormat,

Program pemberdayaan ini tidak mungkin berhasil, jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan dan pembinaan guru. Dukungan dari para kepala sekolah, penilik, dan pengawas terutama dalam pembinaan guru sangat diperlukan. Oleh karena itu, para kepala sekolah, penilik, dan pengawas harus terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan guru, sehingga guru mendapat dukungan dari dua sisi yaitu persetujuan atau restu dari kegiatan yang dilakukan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara seperti ini, program pemberdayaan guru tidak hanya memberdayakan guru, tetapi juga memberdayakan para kepala sekolah, penilik, dan pengawas. Di samping itu, koordinasi antar lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan, terutama dalam penyusunan program dan rekrutmen calon peserta pelatihan, sehingga ketumpangtindihan dan kebingungan para guru dapat dihilangkan, dan usaha pemberdayaan guru tidak dicemari oleh hal-hal yang berasal dari kesalahan koordinasi.

Bagi lembaga pendidikan guru, baik yang mengelola program prajabatan, maupun yang mengelola program penyetaraan, program pemberdayaan guru harus dipandang sebagai sesuatu yang terintegrasi dengan program pendidikan guru sendiri. Artinya, program pendidikan guru harus memasukkan hal-hal yang memungkinkan para calon guru tumbuh menjadi manusia-manusia yang mampu memberdayakan diri sendiri, sehingga kelak ketika ia mulai melaksanakan tugas sebagai guru, kegiatan-kegiatan pemberdayaan guru yang ditemukan di lapangan bukan merupakan sesuatu yang asing. Untuk merealisasikan hal ini, para pengembang dan pelaksana program haruslah bekerja sama dan memanfaatkan semua sumberdaya, termasuk sarana dan fasilitas yang sudah ada. Khusus untuk program penyetaraan yang diselenggarakan dengan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ), kerja sama ini harus dilakukan secara lebih berkualitas, tidak hanya dengan para pengelola teknis, tetapi juga dengan lembaga yang memiliki sumber daya, termasuk sumber daya manusia, yang diperlukan dalam penyelenggaraan program. Artinya, masing-masing pihak harus menyadari bahwa komponen-komponen yang menjadi tanggung jawabnya memberi sumbangan yang sama

kepada keberhasilan program. Oleh karena itu, pembagian tugas dan tanggung jawab ini haruslah disepakati bersama, dan kesepakatan ini benar-benar menjadi rujukan dalam pelaksanaan program. Inilah yang merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan, jika pemberdayaan guru memang benar-benar menjadi kepedulian lembaga pendidikan guru melalui SBJJ.

Terima kasih banyak atas perhatian hadirin, dan dirgahayu Universitas Terbuka.

DAFTAR RUJUKAN

- Brameld, Th. (1965). **Education as Power**. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.
- Darling-Hammond, L & Goodwin, A.L. (1993). Progress toward professionalism in teaching dalam : G.Cawelti (ed). **Challenges and Achievements of American Education, The 1993 ASCD Year Book**. Alexandria : ASCD.
- Ditjen Dikti. (1989). **Pengembangan Pendidikan Pra-Jabatan Guru Sekolah Dasar: sebuah pemikiran dalam rangka menyongsong pendidikan dasar 9 tahun**. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Hopkins, D. (1993). **A Teacher's Guide to Classroom Research**. Buckingham: Open University Press.
- Houston, W.R.; Clift, R.T.; Freiber, H. J. & Warner, A. R. (1988). **Touch the Future: teach**. St. Paul: West Publishing Co.
- Jiono. (1992). **Laporan Penelitian Kemampuan/Pemahaman Guru tentang IPA dan Sarana Pelajaran IPA di SMP**. Jakarta : Balitbang – Dikbud.
- Joyce, B. & Weil, M. (1980). **Models of Teaching**. New York: Prentice-Hall.
- Konsorsium Ilmu Pendidikan. (1993). **Profesionalisasi Jabatan Guru: tawaran dan tantangannya**. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan.
- McNiff, J. (1992). **Action Research : Principles and Practice**. London : Routledge.
- Ministry of Education and Culture. (1998). **Indonesia Education Statistics in Brief**. Jakarta: Ministry of Education and Culture.

- Nasoetion, N. (1996). **Laporan Pendidikan IPA dan Teknologi di SMP** (Science and Technology Secondary Education Project). (Naskah disajikan pada Seminar Dies Natalis UT, 28 Agustus 1996).
- _____. (1998). **Sudahkah Upaya Inovasi Pendidikan yang Dibiayai oleh Pelita dapat Mempengaruhi Proses Pembelajaran?** (Naskah disajikan pada Prapurna Bakti FKIP-UT, 24 Februari 1998).
- Nielson, D.; Somerset, A.; Mahadi, R. & Wardani, IGAK. (1996). **Sthrengthening Teacher Competency and Student Learning**. Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Raka Joni, Prof. Dr. T. (1989). **Mereka Masa Depan, Sekarang. Tantangan bagi Pendidikan dalam Menyongsong Abad Informasi**. (Ceramah ilmiah, disampaikan dalam Upacara Dies Natalis XXXV, Lustrum VII IKIP Malang, 18 Oktober 1989).
- _____. (1998). **Hasil Telaah 6 Usulan PTK PPGSD** (Makalah disiapkan untuk pertemuan PTK di Yogyakarta, 5 Januari 1998).
- _____. (1998). **Pengembangan Model Kurikulum Program D II PGSD**: antara kajian akademik vs pengembangan program. (naskah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Model Kurikulum Program Pendidikan Diploma Tenaga Kependidikan (D II PGSD) Tahun 1998/1999. Jakarta: Pusbang-Kurandik- Balitbang-Dikbud, 6-7 Agustus 1998).
- (ed). (1992). **Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru**. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Ditjen Dikti, Depdikbud.
- Riel, M. (1998). "Teaching and learning in the educational communities of the future". dalam Christ Dede (ed). **ASCD Year Book 1998**. pp. 171-195. Alexandria: ASCD.
- Setijadi (ed). (1992). **Laporan Eksekutif tentang Studi Kebijakan tentang Pengadaan, Pengangkatan, Penempatan dan Pembinaan Guru Sekolah dasar**. Jakarta: Konsorsium Ilmu pendidikan.

Surat Keputusan Menpan No. 26/menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Udin, S.W. dkk (1998). **Keterlaksanaan Kurikulum Baru, Program Penyetaraan D-II PGSD Melalui Sistem Belajar Jarak Jauh** (Laporan Monitoring dan Evaluasi 1997/1998). Jakarta : FKIP Universitas Terbuka.

Wardani, I G. A. K. (1996). **Pemantapan Kemampuan Guru dan Belajar Siswa.**(Naskah disajikan pada Seminar Dies Natalis UT, 28 Agustus 1996).

Wardani, I G. A. K. dkk. (1995). **Laporan Hasil Pemantauan Program Penyetaraan D-II Guru Swadana.** Jakarta : FKIP Universitas Terbuka

Zumwalt, K. (1989). "Beginning profesional teachers: the need for a curricular vision of teaching". dalam M. C. Reynolds (ed). **Knowledge Base for the Beginning Teachers.**pp.173-184. New York: Pergamon Press.

RIWAYAT HIDUP

I G. A. K. Wardani dilahirkan di Denpasar, Bali, pada 28 Oktober 1940. Pendidikan formal yang diselesaikannya adalah Sekolah Rakyat (1954), Sekolah Guru B di Karangasem (1957), Sekolah Guru A di Singaraja (1960), Sarjana Muda Bahasa Sastra Indonesia dari Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar (1967), Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar (1975), Master of Science in Education dalam Elementary and Early Secondary Education dari State University of New York, College at New Paltz (1985), dan Doctor of Education dalam Curriculum and Instruction dari State University of New York at Albany (1988).

Wardani mulai bekerja sebagai guru SD pada tahun 1961. Tahun 1969 ia pindah mengajar ke SPG Negeri Denpasar, dan mulai tahun 1990 menjadi staf pengajar pada FKIP Universitas Terbuka. Selain tugas resmi sebagai guru, ia juga pernah mendirikan Yayasan Pendidikan Swadharma dan sekaligus menjadi Kepala SMP Swadharma (th. 1967-1970). Ia mulai terlibat dalam penataran tingkat nasional pada tahun 1971, dan pada tahun 1976-1977 ia bertugas sebagai penatar keliling Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D). Tahun 1978-1982 ia bertugas sebagai penatar teras nasional Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G). Dalam menjalankan tugas tersebut, ia juga terlibat sebagai anggota Tim Pengembangan Program Pengalaman Lapangan P3G. Sepulang dari menyelesaikan studinya di luar negeri, ia kembali terlibat dalam berbagai program penataran guru, khususnya untuk pendidikan guru sekolah dasar.

Dalam mempersiapkan diri sebagai penatar, Wardani telah berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan studi lapangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia juga sempat kembali ke Amerika pada tahun 1992 untuk mengunjungi berbagai lembaga penyelenggara pendidikan guru dalam rangka studi lapangan Program D II PGSD.